

BAB IV

STRATEGI DIPLOMASI INDONESIA DALAM MENARIK

INVESTASI LANGSUNG LUAR NEGERI (FDI)

NEGARA TIMUR TENGAH

Pada bab keempat ini akan dijelaskan mengenai berbagai strategi diplomasi yang diterapkan oleh Pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dalam menarik investasi dari negara kawasan Teluk. Strategi diplomasi ini didasarkan atas hasil kajian analisis kondisi internal dan eksternal investasi di Indonesia.

A. Strategi Komunikasi Intensif yang dilakukan oleh Para Duta Besar dan Perwakilan Indonesia di Negara-negara Arab

Pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono tampak semakin gencar melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan minat investor negara-negara kawasan Arab untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Disadari bahwa pasca kenaikan harga minyak mentah dunia yang melonjak tajam dan terjadinya krisis finansial di Amerika Serikat, negara-negara investor utama yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan investasi di Indonesia sebagian besar mengalami resesi. Akibatnya, sebagian besar dari mereka melakukan langkah penarikan dana investasinya di Indonesia guna memenuhi dan menyelamatkan perekonomian negara investor yang bersangkutan. Di sisi lain, kenyataan menunjukkan bahwa adanya lonjakan

harga minyak mentah dunia menyebabkan negara-negara Arab sebagai penghasil utama minyak mentah dunia banyak memiliki kelebihan dana yang menganggur dalam jumlah besar. Kondisi ini tentu menjadi potensi investasi bagi beberapa negara lain termasuk Indonesia yang berlomba-lomba untuk dapat menarik potensi investasi masuk ke negaranya.⁶¹

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono untuk menarik minat investor Timur Tengah tersebut adalah dengan mengutus para Duta Besar dan Kepala Perwakilan Indonesia yang bertugas di negara-negara kawasan Timur Tengah untuk berupaya mencari peluang menarik dana segar yang dimiliki negara-negara tersebut. Para duta besar harus mampu membuka jalur komunikasi sehingga peluang investasi yang begitu besar tidak terlepas. Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono meminta mereka agar bisa mengetahui potensi investasi apa saja yang masih menjadi peluang dalam investasi, sehingga bisa dijelaskan kepada investor di setiap Negara serta menjelaskan hal-hal yang masih dipersoalkan oleh investor Timur Tengah terkait dengan kekhawatiran sebagian investor untuk masuk ke Indonesia. sebab, selama ini telah terbangun persepsi negatif tentang iklim investasi di Indonesia yang tidak selamanya benar. Terlebih lagi adanya ikatan emosional dan kedekatan politis yang kuat antara Indonesia dan negara-negara di kawasan Timur

⁶¹ <http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.xml,2008.04.07.14231455&cha>, diakses 19 Agustus 2009

Tengah diyakini akan lebih memudahkan Indonesia berhubungan dalam berbagai bidang dengan negara-negara di kawasan itu. Di pihak lain, negara-negara di kawasan Timur Tengah dan juga Indonesia mengalami berbagai hambatan dalam berhubungan dengan Amerika Serikat dan Eropa, pasca serangan teroris 11 September 2001, sehingga negara-negara Timur Tengah juga lebih banyak mengalihkan perhatian ke kawasan Asia, termasuk Indonesia.⁶²

Optimalisasi peran duta besar dan perwakilan Indonesia di negara-negara Arab dalam mempromosikan potensi investasi yang ada di Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh investor Arab sangat penting. Sebab, selama masa pemerintahan Orde Baru, Pemerintah Indonesia lebih berkiblat pada investor Amerika Serikat, negara kawasan Eropa dan beberapa negara Asia sebagai mitra utamanya. Sedangkan hubungan yang terjalin antara Indonesia dan negara-negara Arab lebih bersifat sosial keagamaan semata. Oleh karena itulah, Pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono sangat menyadari kesalahan kebijakan investasi Indonesia di masa lalu dengan terlalu mengandalkan investor dari mitra klasiknya tersebut. Terlebih lagi, pasca kenaikan harga minyak mentah dunia negara-negara Arab mengalami surplus dana yang begitu besar. Oleh karena itulah, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono memerintahkan para duta besar dan perwakilan Indonesia yang

⁶² <http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.xml.2008.04.07.14231455&cha>, diakses 19 Agustus 2009

ada di negara-negara Arab secara intensif membangun komunikasi dan promosi investasi dalam rangka menarik minat investor Arab masuk ke Indonesia.

Sebagai langkah awal diplomasi Indonesia dalam menarik minat investor Arab adalah melalui peningkatan komunikasi dua arah untuk memaparkan berbagai potensi yang ada di Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh investor negara Timur Tengah. Secara khusus, upaya diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui duta besar dan perwakilannya di Persatuan Emirat Arab (UAE) adalah dengan menyelenggarakan 'Indonesian Festival' pada tanggal 7 April 2009 di Abu Dhabi. Hasil dari kegiatan event tersebut adalah terealisasinya beberapa investasi dari UAE di beberapa daerah di Indonesia.

Capaian kinerja para duta besar dalam menarik minat investor Arab masuk ke Indonesia terlihat dari realisasi investasi itu antara lain: tujuh perusahaan besar PEA mengadakan usaha patungan dengan mitra-mitra di Indonesia di berbagai sektor dengan total investasi US\$ 6,7 miliar; Dubai Port World, menjalin kerja sama dengan PT Pelindo III membentuk PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) dengan nilai investasi US\$ 175 juta (saham DP World di PT TPS sebesar 49%); Dubai DryDocks World yang bermitra dengan Fabtech International Ltd (Dubai) membentuk PT Batam Maritime Center di sektor galangan kapal dengan investasi US\$ 500 juta; Emaar Properties PJSC bermitra dengan 'Bali Tourism Development Corp' untuk pengembangan kawasan wisata Lombok dengan investasi US\$ 600

juta; Limitless dan PT Bakrieland Development untuk proyek Rasuna Epicentrum di Jakarta (US\$ 1,7 juta), RAK Minerals and Metals Investment (RMMI) dengan Pemda Provinsi Sumatera Selatan untuk pembangunan proyek pelabuhan Tanjung Api-Api dan kawasan industri (US\$ 1,5 miliar); RMMI dan PT Kutai Timur Investasma (Kalimantan Timur) untuk penambangan batu bara dan pembangunan proyek rel kereta api untuk batu bara (US\$ 600 juta); Star Petro Energy bekerja sama dengan Pertamina dan Itochu Corp (Jepang) untuk pengembangan kapasitas produksi kilang penyulingan minyak di Balikpapan (US\$ 1,7 miliar). Investasi dari PEA tersebut tak terlepas dari kebijakan yang dianut pemerintah negara PEA 'Melihat ke Timur' setelah sekian lama mereka menerapkan 'Melihat ke Barat'. PEA melihat Indonesia sebagai pasar potensial di luar China dan India.⁶³

Upaya diplomasi lain yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah dengan menjadi tuan rumah Forum Ekonomi Dunia Islam yang ke 5, pada tanggal 2 - 3 Maret 2009. Sejumlah kepala negara dan pemimpin perusahaan global terutama dari negara Muslim, telah hadir dalam pertemuan itu. Forum tersebut menjadi momentum yang tepat dalam mengupayakan tindak lanjut sejumlah kerjasama ekonomi dan perdagangan yang telah disepakati dalam konferensi serupa di Kuwait tahun 2008. Kapitalisasi potensi ekonomi dunia Islam yang antara lain bersumber dari penjualan minyak sangatlah besar. Di Timur Tengah, setidaknya setiap tahun ada

⁶³ Koran Kompas edisi 5 April 2009

surplus 200 miliar dollar AS. Dana itu tidak dapat digunakan jika tidak ada infrastruktur dan jaringan yang memadai di antara negara-negara Islam. Sehingga diperlukan adanya jaringan bisnis untuk memanfaatkan dana itu. Hasil yang dicapai dari Forum Ekonomi Dunia Islam yang ke 5 adalah Deklarasi Jakarta, yang salah satu poin pentingnya adalah dibidang penanganan krisis global, forum tersebut memutuskan untuk: mendukung upaya organisasi negara-negara Islam OKI untuk mempercepat kerja sama ekonomi regional lewat implementasi 10 tahun; mendukung Bank Pembangunan Islam untuk bisa mempromosikan sistem keuangan Islam sebagai alternatif dari sistem yang konvensional; meminta pemerintah dan bank-bank Islam untuk memperluas kredit kecil berbasis syariah dan mendukung upaya untuk pengaturan finansial global dengan mengantisipasi risiko dan kegagalan; serta mendukung pusat pelatihan sistem syariah dengan standar yang harmonis.⁶⁴

B. Kelengkapan Peraturan Perundang-undangan Guna Menjamin Kepastian Berinvestasi di Indonesia

Salah satu aspek penting dalam menumbuhkan iklim investasi di Indonesia termasuk yang berasal dari negara kawasan Teluk adalah adanya jaminan kepastian hukum. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono telah menetapkan

⁶⁴ <http://www.dw-world.com/dw/article/0,,4072430,00.html>, diakses 19 Agustus 2009

berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum berinvestasi di Indonesia.

Awal Maret 2006, pemerintah Indonesia mengeluarkan paket kebijakan investasi yang baru lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2006. Paket ini memuat matriks program berisi serangkaian tindakan, hasil yang ditujum, target waktu, serta penanggung jawab setiap komponen. Langkah tersebut meliputi upaya memperkuat kelembagaan pelayanan investasi dan sinkronisasi peraturan pusat dan daerah, kepabeanan dan cukai, perpajakan, ketenagakerjaan, serta usaha kecil, menengah dan koperasi. Salah satu tindakan pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi adalah menyederhanakan proses pembentukan perusahaan dan izin usaha. Keluaran yang diharapkan dari tindakan itu adalah berkurangnya waktu yang dibutuhkan secara bertahap dari rata-rata 150 hari menjadi 30 hari. Hal ini antara lain ditempuh dengan cara pendelegasian wewenang pengesahan badan hukum kepada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia di propinsi. Pembenaan perpajakan dalam paket tersebut terkait dengan target menyelesaikan amandemen tiga undang-undang (UU), yakni UU Ketentuan Umum Perpajakan, UU Pajak Penghasilan, serta UU Pajak Pertambahan Nilai. Dalam paket itu diatur revisi, terutama yang berhubungan dengan ketentuan umum perpajakan. Paket kebijakan yang berhubungan dengan bea masuk dan cukai terkait dengan target percepatan sistem pelayanan satu jendela melalui berbagai macam modernisasi. Ini terkait dengan upaya meningkatkan jumlah perusahaan yang masuk ke dalam jalur prioritas (*green*

line), yakni perusahaan yang mendapatkan pelayanan lebih cepat tanpa terlalu banyak pemeriksaan.⁶⁵

Sekarang pertanyaannya: apakah paket kebijakan investasi yang baru ini efektif, dalam arti bisa betul-betul mendongkrak investasi di Indonesia dalam, bilang, 2-5 tahun ke depan? Mungkin jawabannya bisa diberikan dengan dua penjelasan sebagai berikut. Pertama, menurut laporan Bank Dunia (World Bank 2005a) mengenai iklim investasi, menciptakan suatu iklim investasi memerlukan suatu kebijakan investasi yang menangani tiga hal berikut: biaya, risiko, dan pembatasan bagi persaingan, yang mana pemerintah memiliki pengaruh sangat kuat. Jika pengaruh pemerintah lewat kebijakan atau perilakunya terhadap ke tiga aspek tersebut negatif, misalnya biaya usaha/investasi menjadi mahal, maka kebijakan-kebijakan tersebut telah menghilangkan/mengurangi kesempatan bagi pertumbuhan usaha-usaha baru atau perluasan kapasitas produksi dari usaha-usaha yang ada, yang artinya menghilangkan kemungkinan peningkatan investasi.

Kebijakan dan perilaku pemerintah yang dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung biaya investasi adalah mulai dari korupsi, besarnya tarif dan sistem perpajakan yang tidak kondusif, jasa-jasa publik, kebijakan perdagangan mengenai bea masuk impor, birokrasi dalam pengurusan izin, kebijakan moneter yang mempengaruhi tingkat suku bunga dan inflasi, hingga pengeluaran pemerintah untuk pembangunan atau perbaikan infrastruktur. Besarnya pengaruh dari semua ini terhadap biaya

⁶⁵ www.kadin-indonesia.or.id, diakses 10 November 2009

investasi tentu bervariasi menurut sektor atau jenis kegiatan ekonomi dan kondisi (terutama keuangan) perusahaan yang melakukan investasi. Bagi perusahaan-perusahaan multinasional yang biasanya memakai sumber eksternal untuk modal pembiayaan, mungkin tidak stabilnya suku bunga di dalam negeri tidak terlalu masalah. Atau, bagi perusahaan-perusahaan asing yang melakukan kegiatan ekonomi di dalam negeri yang tidak terlalu tergantung pada impor untuk bahan bakunya, mungkin besarnya bea masuk impor tidak terlalu mengganggu kegiatan mereka.

Kegiatan investasi berada di dalam suatu lingkungan bisnis yang dinamis dan sangat kompleks. Oleh karena itu, usaha pemerintah, sebaik apapun juga, untuk menciptakan investasi, atau menarik masuk PMA tidak akan berhasil tanpa mempertimbangkan lingkungan bisnis di sektor yang menjadi tujuan investasi dan konteks dari suatu pembangunan ekonomi yang lebih luas yang menciptakan "aturan main" untuk semua kegiatan/jenis usaha dan yang mana mempengaruhi cara bisnis dan pasar bekerja. Lingkungan di mana bisnis beroperasi dapat dibagi dalam dua macam, yakni lingkungan langsung dan lingkungan yang lebih luas. Lingkungan yang lebih luas adalah lingkungan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap suatu kegiatan bisnis, yang terdiri dari komponen-komponen berikut: ekonomi makro (seperti kebijakan perdagangan, kebijakan industri, kebijakan sektor keuangan, dan kebijakan moneter dan fiskal), pemerintah dan politik pada tingkat nasional dan lokal (misalnya legislatif dan proses pembuatan kebijakan, judisiari, dan keamanan dan stabilitas), jasa-jasa yang diberikan

oleh pemerintah (seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan, infrastruktur, utilitas dan jasa keamanan), pengaruh-pengaruh eksternal (seperti perdagangan global, bantuan luar negeri, tren dan selera masyarakat dunia, teknologi, dan informasi), sosial dan kultur (seperti demografi, selera konsumen, dan sikap terhadap bisnis), dan iklim serta lingkungan alam (misalnya sumber daya alam, cuaca, dan siklus pertanian). Sedangkan, yang dimaksud lingkungan langsung adalah lingkungan berpengaruh secara langsung terhadap semua kegiatan usaha, yakni pasar (misalnya konsumen, tenaga kerja, keterampilan dan teknologi, material dan alat-alat produksi, lokasi, infrastruktur, modal, dan jaringan-jaringan kerja), regulasi dan birokrasi (seperti undang-undang, peraturan-peraturan, tarif pajak dan sistem perpajakan, lisensi dan perijinan, standar produk dan proses, dan perlindungan konsumen dan lingkungan), dan intervensi-intervensi yang didanai oleh uang publik (seperti jasa keuangan untuk bisnis).

Implikasi dari kenyataan di atas terhadap kebijakan investasi adalah jelas bahwa kebijakan tersebut tidak akan membawa suatu hasil yang efektif, dalam arti investasi tidak akan meningkat jika tidak didukung oleh kebijakan-kebijakan lain yang mempengaruhi komponen-komponen lain dari lingkungan usaha. Misalnya, di satu sisi, pemerintah ingin meningkatkan investasi di dalam negeri dengan memberikan insentif pajak bagi perusahaan-perusahaan baru atau perusahaan-perusahaan yang mau memperluas kapasitas produksinya, sementara, di sisi lain, pemerintah mengeluarkan kebijakan perdagangan yang menghapuskan bea impor bagi

suatu produk yang kebetulan adalah produk yang menarik bagi calon-calon investor. Atau, contoh lainnya, walaupun banyak insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada investor, investasi tidak akan meningkat atau PMA, khususnya industri-industri yang bersifat *footloose* seperti elektronik dan tekstil, tidak akan memilih Indonesia sebagai tempat kegiatannya selama kondisi infrastruktur belum baik atau tingkat sumber daya manusia (SDM) di Indonesia semakin buruk relatif dibandingkan di negara-negara tetangga. Dengan kemajuan teknologi dan dalam era perdagangan bebas, faktor-faktor keunggulan kompetitif menjadi lebih penting daripada faktor-faktor keunggulan komparatif dalam mempengaruhi mobilisasi investasi lintas negara/wilayah.⁶⁶

UU Penanaman Modal pertama (UU No.1/1967) yang dikeluarkan oleh rezim Soeharto menyatakan dengan jelas bahwa beberapa jenis bidang usaha sepenuhnya tertutup bagi pihak asing karena bernilai strategis bagi negara dan hajat hidup rakyat Indonesia. Bidang usaha tersebut adalah pelabuhan, pembangkit dan transmisi listrik, telekomunikasi, pendidikan, air minum, kereta api, tenaga nuklir, dan media massa. Pada tahun 1968, UU PM Dalam Negeri No. 6/1968 menyatakan bahwa pemodal asing hanya boleh memiliki modal sebanyak-banyaknya 49% dalam sebuah perusahaan. Namun pada tahun 1994 pemerintah menerbitkan PP No. 20/1994 pasal 2 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 yang menjamin investor asing bisa memiliki hingga 95% saham perusahaan yang bergerak di bidang pelabuhan, penerbangan,

⁶⁶ www.kadin-indonesia.or.id, diakses 10 November 2009

pelayaran, kereta api, air minum, pembangkit listrik tenaga nuklir, dan media massa (Al-wa'ie No.77 th VII). Selanjutnya, melalui sidang paripurna 29 Maret 2007 lalu, DPR-RI menetapkan RUU Penanaman Modal No.25/2007 menjadi UU Penanaman Modal No.25 tahun 2007 yang menggantikan UU No.1 tahun 1987 tentang PMA dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang PM Dalam Negeri (Al-Wa'ie No 82 Th VII). UU PM ini melengkapi sejumlah UU lain yang juga berpijak pada kapitalisme dan liberalisasi ekonomi, seperti UU No.7/2004 tentang Sumber Daya Air (SDA), UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan UU No. 19 /2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Berdasarkan UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing, kebijakan dasar pemerintah dalam penanaman modal ini adalah "Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk memperkuat daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal". Persoalan mendasar dalam kebijakan ini berada pada ayat selanjutnya (Pasal 4 ayat 2) yang berbunyi: "Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional". Ayat tersebut diperkuat oleh Bab II Asas dan Tujuan pasal 3 butir d dan Bab V Perlakuan terhadap Penanaman Modal pasal 6 ayat 1. Jadi, seandainya ada investor domestik dan investor asing bersaing dalam suatu bidang usaha, mereka harus diposisikan sejajar. Hal ini jelas sangat merugikan rakyat Indonesia. Bagaimana mungkin investor domestik yang notabene rakyat sendiri harus

diperlakukan sama dengan investor asing yang notabene adalah rakyat negara lain? Ketentuan tersebut tentu saja mempermudah pemodal asing untuk melakukan investasi sebeb-bebasnya di wilayah RI dan mendominasi sektor-sektor yang ada terutama pertambangan. Banyak sekali bagian dalam undang-undang ini yang tidak berpihak pada rakyat Indonesia, salah satunya adalah perizinan. Dalam Pasal 22 yang mengatur tentang Perizinan Hak atas Tanah sub pasal a dijelaskan bahwa hak guna usaha (HGU) bisa diberikan dengan jumlah 95 tahun, dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 tahun dan dapat diperbarui selama 35 tahun Dengan demikian, hak guna akan SDA dimiliki investor asing hampir satu abad. Sehingga meskipun secara sekilas tampak terlihat bahwa paket kebijakan investasi yang dikeluarkan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono mampu merangsang dan meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia, akan tetapi pada hakekatnya justru akan merugikan bangsa dan rakyat Indonesia sendiri, hal ini tidak lain merupakan bentuk neokolonialisme.⁶⁷

Secara khusus, guna menarik minat investor Timur Tengah, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan penetapan Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Surat Berharga Syariah Nasional pada tahun 1998. Undang-undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara sebagai payung hukum penerbitan sukuk negara dan wujud serius Pemerintah Indonesia dalam menarik investor Arab masuk ke Indonesia. Hal ini didasarkan atas rekomendasi utusan khusus Presiden

⁶⁷ www.harian-global.com, diakses 10 November 2009

dengan adanya kebijakan Program Akselerasi Perbankan Syariah 2007-2008 oleh Bank Indonesia. Meskipun, masih dihadapkan pada berbagai kendala baik birokrasi, kualitas SDM maupun jaminan kepastian hukum terhadap keberlangsungan investasi, akan tetapi dengan adanya kemauan politik yang baik (*good will*) dan kerja keras serta dukungan dari semua pihak Indonesia merasa optimis mampu menarik minat investasi langsung luar negeri (FDI) dari negara-negara kawasan Teluk yang sedang mengalami limpahan petroleum dolar pasca terjadinya lonjakan harga minyak dunia.⁶⁹

C. Strategi Diplomasi Melalui Utusan Khusus untuk Timur Tengah

Guna mendukung strategi diplomasi melalui peningkatan komunikasi intensif yang dilakukan oleh para duta besar dan perwakilan Indonesia di negara-negara Arab, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono telah menunjuk mantan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab sebagai utusan khusus presiden untuk Timur Tengah. Presiden menganggap bahwa Alwi Shihab mempunyai riwayat yang baik dalam membina hubungan dan komunikasi dengan pemimpin-pemimpin negara-negara Arab khususnya ketika masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Banyak koleganya yang sampai saat ini menduduki posisi penting bahkan posisi puncak sebagai presiden di negara-negara Arab. Hal ini tentu diharapkan dapat memudahkan strategi diplomasi melalui pendekatan komunikasi yang intensif. Alasan kedekatan hubungan Alwi Shihab dengan tokoh-tokoh penting negara-negara Arab, baik yang ada

⁶⁹ www.kadin-indonesia.or.id , diakses 10 November 2009

di pemerintahan maupun di dunia usaha, menjadi alasan utama penunjukan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono kepada Dr. Alwi Shihab sebagai utusan khusus presiden untuk Timur Tengah.

Sosok yang kaya pengalaman dan punya *network* luas dengan luar negeri ini menaruh harapan besar akan perbaikan bangsa dan negara ini dimasa mendatang. Upayanya untuk meyakinkan dunia internasional dengan jalan mempresentasikan potensi yang dimiliki Indonesia, dengan segala macam sumber daya alam yang dimilikinya semakin menambah kepercayaan dunia internasional terutama bagi negara-negara di kawasan Timur Tengah untuk mengembangkan usahanya di Indonesia. Sebagai utusan khususnya presiden untuk kawasan Timur Tengah dengan tugas utamanya menarik investasi negara Timur Tengah masuk ke Indonesia, beliau berusaha meyakinkan bahwa Indonesia merupakan negara yang cukup aman untuk investasi. Sebaliknya, Indonesia harus menjamin keamanan yang kondusif, politik, hukum dan penanganan korupsi. upaya dan kerja kerasnya dalam mengemban tugas mulai ini, beliau mendapat dukungan penuh dari pemerintah baik Presiden maupun wakil presiden, dengan menindaklanjuti pembicaraan pada tingkat kepala negara atau kepala pemerintahan.⁷⁰

Langkah perdana yang dilakukan Alwi Shihab setelah ditunjuk sebagai utusan khusus presiden untuk Timur Tengah adalah menghadiri KTT OKI di Mekah, Arab Saudi pada bulan Juni 2005. Keikutsertaan beliau dalam rangka mempromosikan potensi investasi yang ada di Indonesia yang

⁷⁰ <http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2007/06/22/1953.html>, diakses 1 Desember 2009

kepada negara-negara Timur Tengah dan meyakinkan negara-negara tersebut bahwa Indonesia adalah negara kondusif bagi investasi mereka. Upaya lain yang dilakukan oleh Alwi Shihab dalam menjalankan misinya tersebut, beliau melakukan kunjungan ke negara Iran untuk membahas kesepakatan-kesepakatan bilateral bersama dengan Presiden Iran, Ahmadinejad dibidang *oil and gas*, kebudayaan, *small and medium enterprise*, *custom*, yang selama ini masih belum optimal diharapkan dapat berjalan secara optimal.

Namun, para investor Timur Tengah belum merealisasikan minatnya karena terbentur dengan persoalan citra negara ini yang terkesan sangat tidak kondusif dan tidak *friendly* bagi investor asing. Disinilah beliau berusaha meyakinkan para investor asing dari Arab bahwa citra yang buruk itu tentang Indonesia itu tidak benar dan tidak seperti yang disangka selama ini. Alwi Shihab juga menjadi mediator bagi pengusaha atau perusahaan Indonesia yang ingin berbisnis di Timur Tengah. Contohnya, berdirinya perusahaan patungan antara Indonesia dan Iran, Hengham Petrochemical Company, yang memproduksi amonia dan urea dengan kapasitas 990 ribu metrik ton amonia dan 1.150.000 metrik ton urea per tahun di Iran. Perusahaan patungan bernilai US\$ 750 juta ini hasil kerja sama antara Pupuk Sriwijaya, NPC Intenational, dan Petrochemical Industries Investment Company. Dengan Maroko, akhir Desember 2005 konsorsium Indonesia yang terdiri atas Petrokimia gresik, Pupuk Kaltim, Bosowa Energi dan Medco Energy International telah menandatangani memorandum of understanding (MOU) dengan Office Cherifen Des Phosphate (BUMN

pertambangan Maroko) untuk pembangunan pabrik pupuk fosfat berkapasitas 400 ribu ton senilai US\$ 300 juta.⁷¹

Alwi mengingatkan kepada pelaku dunia usaha, birokrat dan unsur terkait lainnya bahwa investor Timur Tengah yang masuk ke Indonesia merupakan investor-investor besar yang memiliki dana siap cair. Oleh karena itu, patut dicamkan oleh para pengusaha Indonesia adalah sejauh mana komitmen para investor tersebut berinvestasi di Indonesia di saat negeri ini masih dikenal sebagai negara yang *no investor friendly*. Hal ini yang tertanam kuat di benak para investor, bukan hanya dari Timur Tengah, tetapi dari negara mana pun. Stigma ini harus dikikis, terutama oleh pemerintah pusat maupun daerah dengan mewujudkan investasi mereka agar tak sekadar menjadi niat yang hanya baru sampai tahap MOU, tanpa ada kelanjutannya. Tentu saja, orang Indonesia harus membuktikan bahwa negeri ini *friendly for investment*. Salah satu caranya adalah dengan menjalankan birokrasi yang lebih lean, transparan dan beretika tinggi.

Salah satu bidang yang diminati adalah pasar finansial Asia yang menawarkan berbagai bentuk portofolio. Gairah investor Timur Tengah itu makin kuat, karena prospek pasar Asia terus tumbuh dan berkesinambungan. Kini investor Arab berkeinginan menempatkan portofolio untuk Asia hingga mencapai US\$ 250 milyar atau sekitar 30% dari total investasi mereka dalam

⁷¹ <http://www.swa.co.id/swamajalah/artikellain/details.php?cid=1&id=8352> , diakses 1 Desember 2009

kurun lima tahun ke depan. Angka ini cukup besar, karena pada saat ini investasi portofolio negara-negara Timur Tengah yang lari Asia baru sekitar 10% dari total investasinya di seluruh dunia. Yang diminati investor Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, dan Uni Emirat Arab adalah bidang-bidang yang tumbuh pesat, seperti perbankan, telekomunikasi, dan properti. Kerja sama ini akan memperkuat hubungan ekonomi energi antara Asia dan Arab. Selama ini, hubungan ekonomi kedua kawasan diikat erat dengan ekonomi energi. Kini Asia mengonsumsi 30% dari total konsumsi minyak bumi dunia atau setara dengan 23 juta barel per hari.⁷²

Melihat besarnya minat investor Timur Tengah, sedari awal pemerintah dan pengusaha Indonesia tidak tinggal diam. Pada pekan terakhir April 2006, misalnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan lawatan delapan hari ke Timur Tengah. Negara yang disambangi presiden antara lain Arab Saudi, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Selain melakukan pembicaraan dengan pemimpin negara-negara Arab, presiden juga menggelar forum dialog dengan para pengusaha Timur Tengah. Tujuan utama presiden apa lagi kalau bukan menangkap investasi Timur Tengah. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Indonesia membutuhkan investasi langsung di sektor riil. Hal ini sekaligus dimaksudkan untuk menekan angka pengangguran. Karena itulah, presiden mempromosikan beragam kebijakan kemudahan investasi untuk ditawarkan kepada investor

⁷² <http://www.gatra.com/2007-12-24/artikel.php?id=110555>, diakses 1 Desember 2009

Arab. Satu setengah tahun kemudian, aksi presiden itu diteruskan dengan manuver Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) melalui forum investor internasional (*Islamic Investor Forum*) pada Indonesia Sharia Expo 2007, 24-28 Oktober 2007, di Jakarta Convention Center. Perhelatan itu dipakai sebagai sarana untuk menarik investasi Timur Tengah datang ke Indonesia. Sejumlah investor kelas kakap asal Timur Tengah menjadi incaran utama. Kehadiran investor kelas kakap diharapkan dapat memicu investor lain mau menanamkan dananya di Indonesia. Pertengahan September 2006, MES juga menyelenggarakan forum investor internasional secara langsung di sejumlah negara Arab. Kegiatan yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla ini merupakan tindak lanjut kunjungan presiden empat bulan sebelumnya. Beberapa forum pertemuan yang dipimpin Jusuf Kalla dengan sejumlah pengusaha lokal dilakukan di Dubai, Abu Dhabi, Qatar, dan Jeddah. Isi forum investor pada pertengahan September 2006 itu adalah menjajaki investasi syariah di Indonesia serta pertemuan bisnis antar-investor dan berbagai perusahaan di Indonesia.

Aliran dana Timur Tengah cenderung memiliki karakteristik investasi jangka panjang dibanding dana global yang lebih suka masuk ke pasar portofolio (pasar modal, pasar uang) yang berjangka pendek. Karena itu terpuruknya pasar finansial global, tidak semerta-merta mampu membuat dana Timteng beralih ke pasar lain, seperti Indonesia. Posisi dana Timteng yang ada di pasar portofolio AS belum mengalami perubahan dibanding sebelum terjadinya krisis *subprime mortgage* (krisis perumahan). Di sisi lain

Pasar Indonesia juga kurang menarik, sebagai *emerging market*, dengan keterbatasan produk yang ada, saham-saham unggulan dengan fundamentalnya yang terkena dampak resesi menjadi pertimbangan tersendiri dalam upaya menarik minat investor Timur Tengah.⁷³

Kondisi di atas tentu menjadikan tugas Alwi Shihab sebagai utusan khusus Presiden untuk Timur Tengah semakin berat dalam rangka menarik minat investor Timur Tengah. Meskipun diakui bahwa ada beberapa investor yang berani mengambil risiko dengan memindahkan dana dari AS ke Indonesia, dengan harapan resesi segera pulih, tetapi jumlahnya tidak signifikan. Sebab, dana-dana Timur Tengah dikelola oleh perusahaan-perusahaan investasi besar seperti Merrill Lynch dan HSBC, yang jangkauan investasinya sudah mendunia. Indonesia bukan substitusi langsung AS, dalam arti jika dana dari Amerika keluar, tidak langsung dialihkan ke Indonesia. Meski demikian, Indonesia tetap dilirik dan dianggap berpotensi. Pasar sahamnya masih dinilai murah oleh investor asing, dan trennya pun masih menguat. Apalagi dana Timteng yang berpotensi masuk ke pasar finansial global nilainya sangat besar, mencapai 800 miliar dollar AS.

Berbeda dengan pendapat dan analisa pakar ekonomi dan investasi, Dr. Alwi Shihab menegaskan bahwa investor asal Timur Tengah tetap berkomitmen mewujudkan sejumlah proyeknya di Indonesia. Bahkan beliau

⁷³ Kepala Perwakilan Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank/IDB) Charmeida Tjokrosuwarno, di Jakarta Selasa 3 Maret 2009 seperti yang dikutip dalam http://alwishihab.com/index.php?option=com_content&task=view&id=137&Itemid=1

menjelaskan bahwa dana sebesar 7 miliar dollar AS dari negara-negara di kawasan Timur Tengah (Timteng) segera masuk Indonesia untuk diinvestasikan ke berbagai sektor industri. Sektor-sektor dimaksud antara lain agroindustri, properti, perbankan, dan telekomunikasi. Beberapa hasil temuan potensi investasi tersebut dijabarkan dalam Forum Ekonomi Islam Dunia (World Islamic Economic Forum/WIEF) ke-5 di Jakarta. Salah satu investor Arab yang sudah lama menanamkan modalnya di Indonesia adalah Qatar Telecommunication (Q-tel) yang berinvestasi di Indosat, Emaar Properties berinvestasi properti di Lombok sebesar USD600 juta, serta Draydock di Batam 500-600 juta dollar AS. Disusul kemudian beberapa investor berniat berinvestasi di sektor perbankan. Mereka antara lain Al-Barakah, Qatar Islamic Bank, Kuwait Financing House, Al-Raji, maupun Tadamon Bank. Tadamon Bank akan membuka bank syariah di Indonesia.⁷⁴

Beberapa hasil diplomasi yang telah dilakukan oleh Alwi Shihab dalam menarik minat investor Negara-negara Arab masuk ke Indonesia dapat dilihat dari beberapa Investor Timur Tengah yang sudah melakukan kerjasama dan berinvestasi di Indonesia seperti, EMAAR: Perusahaan developer raksasa dari Dubai, UAE yang menanamkan modalnya di sektor pariwisata Pembangunan kawasan pariwisata bertaraf internasional/ kelas dunia di Pulau Lombok. Pihak EMAAR akan melakukan investasi di

⁷⁴ http://alwishihab.com/index.php?option=com_content&task=view&id=137&Itemid=1, diakses 18 November 2009

kawasan Tourist Development Center seluas 1,175 ha milik PT. PPA dengan nilai investasi lebih dari USD 600 juta. Dibiidang Energi misalnya Gulf Petroleum Limited dan BDO Group dari Bahrain (Mining power Corporation) akan bekerjasama dengan PT Indonesia Investment Development dalam Pembangunan Power plant di Indragiri Riau, Indonesia serta Al Salam Bank Bahrain: merupakan salah satu perusahaan EMAAR group, Pihak perbankan Emaar group (Al Salam Bank) untuk pendirian cabang di Indonesia terutama mengantisipasi investasi EMAAR di Lombok dan beberapa mega proyek lainnya siap masuk ke Indonesia.⁷⁵

Hasil kunjungan ke Iran soal rencana pendirian pabrik pupuk patungan (*joint venture*) Indonesia-Iran di Iran sudah akan sampai kepada titik pencarian *financing*, melalui Asian Development Bank (ADB). Kunjungan Alwi ke Iran juga disertai rombongan dari PUSRI dan PGN (Perusahaan Gas Negara) mendapat sambutan sangat hangat dari pihak Iran. PGN ingin mengimpor gas alam cair. Namun pihak Iran bahkan memberikan peluang untuk mengembangkan gas yang ada sampai kepada industri hilir (*down stream*). Jadi disamping bisa mengimpor LNG dari Iran, hal ini sangat menjanjikan bagi kerjasama di bidang *oil and gas*. Menurut Alwi Shihab, hasil kerja sama dengan perusahaan Timur Tengah, di antaranya adalah berdirinya Al Ijarah — perusahaan multifinance berbasis syariah yang

⁷⁵ <http://www.swa.co.id/swamajalah/artikellain/details.php?cid=1&id=8352>, diakses 2 Desember 2009

pertama di Indonesia. Ini hasil patungan Bobyan Bank, International Leasing and Investment Company milik Islamic Development Bank yang berpusat di Kuwait, dan Bank Muamalat Indonesia. Lalu, EMAAR, konsorsium beberapa perusahaan dari UEA, akan masuk ke Indonesia dan membentuk perusahaan patungan (85% saham EMAAR dan 15% perusahaan Indonesia) guna mengembangkan aset tanah milik negara di Lombok seluas 1.200 hektare yang akan dijadikan kawasan pusat pariwisata internasional. EMAAR sudah membenamkan dana US\$ 600 juta dan pembangunannya direncanakan selesai dalam waktu 3-4 tahun mendatang. Kemudian, LIMITLESS (Dubai World Group), perusahaan pengembang raksasa milik Pemerintah Dubai yang tengah melakukan finalisasi perjanjian kerja sama dengan Grup Bakrie dalam proyek Rasuna Epicentrum, Jakarta, yang akan menjadi pusat pengembangan bisnis terbesar di Asia Tenggara seluas 60 ha. Malah, perusahaan Grup Bin Ladin juga telah menambah kepemilikan sahamnya di Grup Bakrie lewat PT Bakrie dan Brothers Tbk. Grup Al Baraka akan masuk ke bisnis perbankan syariah dengan cara mengakuisisi bank kecil. Dan, yang sedang hangat dibicarakan saat ini adalah Qatar Investment Authority, yang membentuk perusahaan patungan dengan Pemerintah Indonesia dengan modal awal US\$ 1 miliar yang akan masuk ke bidang infrastruktur. Contoh lain, Ras Al Kheimah Investment Authority dari UEA. Perusahaan ini berencana mengembangkan terminal curah untuk menampung hasil pertanian, perkebunan dan pertambangan di Pelabuhan Tanjung Siapi-api, Sumatera Selatan. Pembangunannya dimulai tahun 2007.

Selain itu, ada Qatar Telecom (Qtel) yang telah membeli saham perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di negeri ini, Indosat.

Albaraka Banking sebenarnya pihaknya sejak 2,5 tahun lalu berencana membuka kantor cabang Bank Albaraka di Indonesia. Menurutnya, pemilik Albaraka Banking Group (ABG), Sheikh Saleh Abdulla Kamel, berniat berinvestasi langsung di industri perbankan Indonesia dengan cara membangun kantor cabang, selainya bank-bank asing yang lebih dulu hadir di Indonesia.

Grup ini tertarik berinvestasi di negeri ini karena hubungan perdagangan dan ekonomi antara Indonesia dan negara-negara Arab, termasuk Bahrain – lokasi kantor pusat ABG -- semakin berkembang. Hal ini mendorong sejumlah lembaga keuangan Islam, termasuk Al Baraka, berniat berbisnis di Indonesia, terlebih mayoritas penduduk negeri ini adalah Muslim. Al Baraka berkeinginan berpartisipasi dalam persoalan pembiayaan investasi atau pendanaan dan memberikan fasilitas perdagangan dan investasi antara Indonesia dan negara-negara Arab. Namun, sayangnya, niat membangun kantor cabang bank dan mengoperasikannya langsung terbentur oleh peraturan Pemerintah Indonesia yang belum mengizinkan para investor asing membuka bank Islam di negeri ini. Karena itu, Al Baraka akhirnya hanya bisa membuka kantor perwakilan yang tidak berfungsi sebagai kantor bank, tapi untuk memfasilitasi proses investasi dan pembiayaan dari Indonesia ke Arab, dan sebaliknya.

Di Indonesia, ABG akan fokus pada pembiayaan sektor agroindustri yang bisa berupa joint venture. Total dana yang diinvestasikan sekitar US\$ 5 miliar yang siap dikucurkan per akhir 2008. Dan, tidak menutup kemungkinan akan mengakuisisi beberapa bank kecil dan mengonversikannya menjadi bank syariah. Bank apakah itu? "Saya tidak bisa menyebutkannya karena sedang dalam proses studi kelayakannya," ujar Adnan berkelit. Yang jelas, sampai saat ini, Albaraka sudah menjalin kerja sama investasi dengan Grup Bosowa untuk pendanaan berbagai macam proyek infrastruktur milik Bosowa.

Corporate Communication, GSM milik Saudi Telecom Company dan Maxis Communications Malaysia, menceritakan pengalaman membangun bisnisnya di Indonesia. Axis berhasil membangun lebih dari 200 base transceiver station di seluruh Indonesia dengan rata-rata pembangunan 80 BTS setiap minggu. Dan, dana sekitar US\$ 1 miliar telah dibenamkan untuk proses mempercepat penetrasi pasar Axis di Indonesia sampai akhir 2008.

Axis memang menyasar konsumen pemakai telepon seluler yang menginginkan tarif percakapan yang murah dan terjangkau. Meski demikian, Axis tetap menjaga kualitas sinyal dan suaranya. Axis menawarkan sistem telekomunikasi seluler dengan tarif terjangkau, simpel dan transparan tanpa disertai syarat dan ketentuan yang tersembunyi. Hal ini sesuai dengan hasil analisis pasar tim Axis, bahwa masih ada 150 juta orang yang belum memiliki akses atas komunikasi seluler karena terbentur biaya. Inilah peluang bagus yang dilihat oleh para pemegang saham Axis, sehingga mau

berinvestasi di Indonesia. Sekarang, ada beberapa wilayah yang menjadi titik sasaran agresif Axis, yakni Jabodetabek, Jawa, Banten, Bali, Lombok dan Sumatera Utara. Dan, Axis siap menjangkau seluruh wilayah Nasional pada 2009.

Meskipun investari Timur Tengah sedang marak di sini, ada hal yang patut diperhatikan, yakni sampai sejauh mana likuiditas para investor Timur Tengah tersebut mampu bertahan. Pasalnya, para investor Timur Tengah itu diuntungkan sekali dengan melonjaknya harga minyak bumi sehingga memiliki dana yang sangat besar. Namun, sekarang harga minyak mengalami penurunan kembali. Disamping itu, reputasi para investor ini, terutama tim manajemen di belakangnya, juga patut dipelajari: apakah mereka memiliki profesional yang tepat dan berintegritas tinggi untuk mengelola dana mereka? Mengapa? "Karena para pemilik dana 'cair' ini menjadi sasaran empuk para fund manager. Namun, ciri para investor ini inginnya berinvestasi langsung di sektor riil, khususnya di Indonesia. Alasannya, bisa lebih memantau perputaran dananya.

Terkait dengan pemantauan atau pengawasan, para investor Timur Tengah lebih senang membangun kantor perwakilan karena lebih bisa menghemat biaya operasional dibandingkan membuka kantor cabang seperti bank karena akan memerlukan dana dan SDM yang banyak. Untuk membuka kantor cabang bank di Indonesia, berdasarkan peraturan perbankan Indonesia saat ini, paling tidak harus punya 200 kantor cabang terlebih dulu. Sementara, untuk buka bank baru pun, harus punya modal sekitar Rp 1

triliun. Apalagi, sekarang ada pembatasan dari Pemerintah Indonesia untuk bank asing yang ingin membuka cabangnya di sini. Maka, pilihan yang paling menarik adalah mengakuisisi bank-bank kecil yang dikonversi menjadi bank syariah.

Di sektor keuangan syariah, sebelum RUU SBSN disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Juni 2006. Investor Timur Tengah tertarik menanamkan modalnya antara lain lewat instrumen obligasi syariah atau sukuk. Setelah RUU SBSN keluar dan krisis melanda dunia, peluang itu semakin menjadi besar. Saat terjadi krisis keuangan global justru menjadi momentum untuk bersikap antisipatif pada berbagai perubahan di dunia. Misalnya, saat ini sebenarnya adalah waktu yang tepat agar Indonesia tidak lagi hanya melihat ke Barat sebagai sumber permodalan dan tempat melakukan investasi. Ini kesempatan bagi Indonesia untuk *mereview* kembali tentang modal investasi syariah sebagai modal yang lebih menarik.

Penyelenggaraan forum Masyarakat Ekonomi Syariah di Jakarta telah tersebut membuahkan hasil nyata, forum investor internasional menargetkan, 10 hingga 20 proyek investasi dapat ditawarkan kepada investor Timur Tengah. Beberapa BUMN dan perusahaan swasta di sektor minyak dan gas, perkebunan, transportasi, dan telekomunikasi dipersilakan membuka tawaran proyek kepada para investor. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, beberapa proyek bisa gol. Dalam forum investor internasional pertama ke luar negeri tahun lalu, terjadi kerja sama antara PT Krakatau Steel dan Al-Tuwairqi, perusahaan baja nomor dua di Timur Tengah asal Arab Saudi. Proyek itu

senilai US\$ 326 juta. Selain proyek di sektor-sektor riil yang langsung bisa membuka lapangan kerja, salah satu investasi yang ditawarkan adalah portofolio berbasis syariah. Apalagi, sistem ekonomi syariah di Indonesia tengah tumbuh pesat.⁷⁶

Potensi ekonomi syariah ini perlu digarap dengan sungguh-sungguh. Para pengusaha harus memperhatikan kualitas produk, efisiensi, keamanan, dan hasil yang dapat dinikmati investor. Satu hal yang masih tertinggal adalah kemampuan dari dalam negeri ketika menyerap dana investasi Timur Tengah. Kemampuan ini menyangkut keberadaan sumber daya manusia di bidang ekonomi syariah yang tidak mencukupi dan perangkat hukum yang belum mampu memayungi produk-produk ekonomi syariah. Misalnya obligasi syariah atau *sukuk* (surat utang syariah). Tak bisa dimungkiri, minat investor Timur Tengah pada produk-produk keuangan atau *institutional finance* lebih besar ketimbang pada jenis investasi lainnya. Kebanyakan investor Arab datang ke negara tujuan investasi tanpa membawa proposal pendirian perusahaan. Mereka lebih berminat membeli surat berharga. Demikian juga dalam membangun bank-bank syariah di India dan Pakistan, banyak yang memilih menguasainya dengan cara membeli 50% lebih saham di bank tersebut.

⁷⁶ <http://www.swa.co.id/swamajalah/artikellain/details.php?cid=1&id=8352> , diakses 2 Desember 2009

Dalam melakukan investasi di obligasi dan saham, kebanyakan investor Timur Tengah memanfaatkan jasa penasihat keuangan andal. Sejumlah lembaga keuangan itu sekaligus berfungsi sebagai pengelola. Beberapa lembaga keuangan tingkat dunia itu antara lain JP Morgan, Goldman Sachs, dan Citigroup. Merekalah yang menyarankan, di sektor dan perusahaan mana saja investasi harus dilabuhkan agar membuahkan keuntungan berlipat. Model investasi itu kurang digarap oleh badan usaha atau pengusaha Tanah Air untuk menarik investor Timur Tengah. Indonesia masih kalah jika dibandingkan dengan Malaysia. Sampai tahun 2005, misalnya, dana yang dapat diserap oleh Malaysia dalam bentuk produk keuangan lebih dari US\$ 4 milyar. Untuk investasi langsung dari Timur Tengah, beberapa yang sudah dijajaki hingga November 2006 adalah investasi properti di Jakarta dan beberapa investasi di kawasan wisata, misalnya wisata bahari di Pulau Lombok. Perusahaan itu berasal Qatar dan Uni Emirat Arab.

Utusan khusus RI untuk kawasan Timur Tengah, Alwi Shihab, mengungkapkan, investasi Timur Tengah yang masuk ke Indonesia pada 2008 mencapai 7 miliar dolar AS, kemudian pada tahun 2009 ditargetkan mencapai 10 miliar dolar. Di samping investasi langsung, pemerintah juga menerbitkan sukuk global perdana sebesar 650 juta dolar AS pada bulan April lalu. Obligasi syariah dengan imbal hasil sekitar 8,8 persen itu akan jatuh tempo pada 23 April 2014. Secara geografis, calon pembeli sukuk global Indonesia 30 persen berasal dari Timur Tengah, sekitar 40 persen dari

Asia (termasuk domestik), Amerika Serikat hanya 19 persen dan Eropa 11 persen. Penerbitan sukuk ini penting karena dapat menutup defisit APBN sebesar Rp 139,5 triliun atau 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Beberapa capaian di atas merupakan hasil kerja keras lobi-lobi yang dilakukan oleh utusan khusus Presiden untuk Timur Tengah, Dr. Alwi Shihab. Tentunya capaian di atas harus didukung dengan konsisten Pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor.⁷⁷

Di sektor pariwisata, Direktorat Jenderal Pemasaran Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI telah mengadakan simposium yang bertajuk Simposium Strategi Pemasaran Pariwisata di Kawasan Timur Tengah 2006-2009. Simposium yang digelar di Balairung, Gedung Sapta Pesona, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Jl. Medan Merdeka Barat no. 17, Jakarta pada tanggal 28 Juni 2006. Acara ini diselenggarakan dalam rangka mencapai sasaran terbentuknya gagasan pengembangan citra pariwisata Indonesia di kawasan Timur Tengah dan arah pengembangan industri pariwisata Indonesia yang memperhitungkan pasar Timur Tengah sebagai pasar potensial. Selain itu, acara ini mengetengahkan Bapak Alwi Shihab dan Bapak Sugiharto sebagai pembicara utama. Setelah melakukan riset pasar, diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Timur Tengah begitu pesat. Pasar wisata Timur Tengah membelanjakan US\$ 12 juta tiap tahunnya. Kecenderungan berwisata ke luar negeri yang dilakukan wisatawan asal

⁷⁷ <http://internazionale2009.blogspot.com/2009/06/kontribusi-negara-arab.html>, diakses 10 November 2009

bangsa-bangsa Arab tidak hanya karena income per capita yang tinggi, tapi juga didukung masa liburan yang panjang, yaitu dari Juni hingga September, dan juga kedekatan kultur religi.

Kenyataan bahwa informasi dan promosi yang dilakukan di Timur Tengah masih rendah, maka perlu dilakukan upaya promosi dengan strategi pemasaran yang terencana. Salah satu upaya yang dilakukan Menbudpar ialah bekerjasama dengan Menteri Tenaga Kerja untuk menjadikan setiap tenaga kerja Indonesia yang dikirim ke Timur Tengah sebagai duta wisata yang dilengkapi dengan marketing kits. Selain itu, sebuah *test case* dilakukan dengan mengikuti Arabian Travel Mart yang ternyata mendapatkan respon positif. Keragaman yang berwujud kesegaran dan kehijauan alam yang dimiliki Indonesia menarik perhatian para calon wisatawan Timur Tengah. Visa on Arrival bagi 9 negara Timur Tengah telah disediakan. Penerbangan yang selalu penuh saat berangkat dari Indonesia untuk tujuan haji dan umroh, akan dimanfaatkan pada saat terbang kembali ke Indonesia dengan mengangkut wisatawan asal Timur Tengah untuk mengisi kekosongan yang selama ini terjadi. Pemandu dan panduan berbahasa Arab akan disediakan sekaligus fasilitas hotel dan restoran serta tempat hiburan yang disesuaikan bagi pasar ini. Diharapkan para stakeholder atau pemangku kepentingan pariwisata dapat berperan dalam mengembangkan destinasi sekaligus melaksanakan strategi pemasaran yang tepat, efisien, dan efektif bagi dan di

kawasan Timur Tengah. Selain itu, melalui acara ini diharapkan pula terciptanya arah kebijakan Pemerintah terhadap pasar Timur Tengah.⁷⁸

Hasil diplomasi yang paling tampak nyata adalah investor Arab menilai bahwa pasar keuangan syariah sebagai pintu masuk investasi Arab di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan International Islamic Financial Market (IIFM) menyatakan sikap akan menerima dengan baik sukuk Indonesia. Alasannya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) selalu menempuh prosedur yang ketat tetapi ramah dalam setiap memproses dan merekomendasi syariah produk keuangan syariah di Indonesia. Sukuk di Indonesia memiliki kesesuaian syariah cukup moderat, dan tidak terlalu liberal seperti di negara lain. Padahal salah satu faktor penting menarik dana investasi Timur Tengah adalah sukuk harus merupakan sukuk global. Dan sukuk baru dapat dikatakan global apabila diperdagangkan di seluruh negara. SUN Syariah bisa mendatangkan investasi hingga 2 miliar dollar AS dari Timur Tengah ke Indonesia.

Obligasi negara berbasis syariah, atau sukuk memiliki pangsa pasar yang jelas, pembiayaan oleh bank-bank berbasis syariah di Indonesia juga menunjukkan trend peningkatan. Menurut data Bank Indonesia per Agustus 2006, industri bank syariah sudah beraset Rp 23,57 triliun. Dari aset sebesar itu nilai pembiayaan perbankan syariah jumlahnya mencapai Rp 19,04 triliun. Persentase porsi pembiayaan perbankan syariah untuk jenis

⁷⁸ <http://www.budpar.go.id/page.php?ic=512&id=1169>, diakses 18 November 2009

penggunaan modal kerja sangat dominan, mencapai sekitar 52,46 persen atau Rp 9,98 triliun. Diikuti porsi untuk jenis pembiayaan investasi 25,06 persen atau Rp 4,88 triliun, dan untuk jenis penggunaan konsumsi mencapai 21,89 persen atau Rp 4,17 triliun. Jika dilihat berdasarkan golongan pembiayaan dalam komposisi pembiayaan perbankan syariah, porsi kelompok usaha kecil dan menengah sangat mendominasi. Jumlahnya mencapai 67,99 persen, atau Rp 12,61 triliun. Pertumbuhan kredit yang cepat secara implisit akan diikuti kenaikan rasio pembiayaan bermasalah. Perbankan syariah mencatat selama sebulan terakhir jumlah pembiayaan dengan kolektibilitas lima atau macet mencapai Rp 361,12 miliar, kolektibilitas empat atau diragukan Rp 188,54 miliar, dan kolektibilitas tiga atau kurang lancar Rp 418,33 miliar. Dengan demikian hingga Agustus 2006 rasio pembiayaan bermasalah perbankan syariah sudah mencapai 5,08 persen. Itu sebab kapasitas bank syariah dalam melakukan pembiayaan perlu diakselerasi supaya bisa mengimbangi ekspansi, khususnya dalam manajemen resiko.

Lewat sebuah proposal, Indonesia berharap dapat memperoleh kucuran pinjaman dana berbasis syariah dari The Islamic Development Bank, IDB, atau Bank Pembangunan Islam senilai Rp 43,751 triliun tepatnya 4.753.950.000 dollar AS. Dana sebesar itu akan ditujukan untuk empat keperluan. Pertama, untuk pembangunan rumah susun sederhana (rusun) di berbagai kota senilai 2.202.300.000 dollar AS, pengembangan kapasitas bank syariah dalam penerbitan kredit kepemilikan rumah 2.504.900.000 dollar AS, pengembangan kapasitas lembaga pembiayaan non-bank berbasis syariah

dalam penerbitan kredit mikro perumahan 45.150.000 dollar AS, dan bantuan teknis pengembangan instrumen fasilitas pembiayaan sekunder yang islami 1.600.000 dollar AS.

IDB berkomitmen kuat membantu Indonesia dalam pengembangan perumahan. Menpera menggambarkan, dana yang tersedia tidak akan mampu memfasilitasi seluruh usulan proyek yang diminta. Sektor perumahan pun masih merupakan sesuatu yang baru bagi IDB. IDB akan memberikan bantuan teknis dalam pembangunan rumah susun sederhana di Jakarta dan Surabaya. IDB siap memobilisasi dana besar yang tersedia di kawasan Timur Tengah, baik itu berbentuk ekuitas maupun investasi langsung. IDB bahkan juga menandatangani nota kesepahaman yang menyatakan komitmennya menyediakan dana 500 juta dollar AS, dan masih akan memobilisasi dana tambahan hingga 1 miliar dollar AS, yang dikhususkan untuk membantu pengembangan perumahan. Timur Tengah, sedang memiliki dana cadangan dalam jumlah besar sebagai hasil tingginya kenaikan harga minyak. Implementasi MoU tersebut perlu ditindaklanjuti dengan usulan proyek, baik berupa usulan bantuan teknis maupun bantuan perumahan langsung kepada IDB Board of Executive di Jeddah. Dalam hal ini, IDB dapat menjalankan dua peran. Yaitu sebagai sumber pendanaan (*source financing*), atau sebagai katalis.⁷⁹

Potensi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia masih besar,

⁷⁹ <http://www.beritaindonesia.co.id/ekonomi/obligasi-negara-berbasis-syariah/>, diakses 18 November 2009

sehingga menarik perhatian para investor. Selain itu, masih ada potensi di sektor infrastruktur yang patut dibiayai. Para investor baru menyadari bahwa Indonesia memiliki potensi besar yang tidak kalah dibandingkan Malaysia. Indonesia paling stabil di dunia dengan tidak terkena dampak krisis yang besar. Sedikitnya dua negara dari Timur Tengah akan menanamkan investasi pada perbankan di Indonesia tahun ini. Perbankan nasional menarik bagi investor Timur Tengah. Pada 2009, konsorsium investor asal Yaman dan Arab Saudi akan membuka kantor representatif (Full Plat Bank) di Jakarta. Bank dari Timur Tengah, hanya berupa kantor cabang, sehingga nantinya akan berupa representatif penuh. Perbankan syariah di Indonesia menarik menjadi tujuan investasi. Sebab, pangsa pasarnya masih luas tapi khusus pasar syariah masih minim. Masuknya perbankan asing dari Timur Tengah berkaitan dengan keberadaan perusahaan Timur Tengah yang berada di Indonesia. Perbankan asing ini merupakan sarana pembiayaan mereka di Indonesia. Meskipun diakui bahwa investasi perbankan di Malaysia lebih dulu daripada Indonesia, tapi kondisi Indonesia secara umum masih lebih baik daripada negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Perekonomian Indonesia lebih stabil dan berprospek dalam investasi perbankan. Jadi, investasi perbankan syariah Indonesia bisa bersaing.

Pemerintah Indonesia menargetkan nilai kerja sama yang bisa diperoleh dalam WIEF ke-5 mencapai 5 miliar dollar AS. Pemerintah Indonesia berhasil mengumpulkan komitmen investasi dari sejumlah negara senilai 3,55 miliar dollar AS dalam WIEF. Kerja sama itu mencakup

berbagai proyek di lingkungan BUMN dan pemerintah daerah. Hal ini menjadi bukti kerja keras diplomasi yang dijalankan oleh Alwi Shihab sebagai utusan khusus Presiden untuk menarik minat investor Arab masuk ke Indonesia. Seperti dilaporkan bahwa empat proyek terbesar meliputi kerja sama antara Bank Muamalat dan National Commercial Bank Arab Saudi, selain Islamic Payment System Sdn Bhd dan PT Pos Indonesia. Juga pendanaan delapan pesawat Boeing 737-800NG Garuda Indonesia oleh Dubai Aerospace Enterprises (DAE) senilai US\$359 juta. Di bidang energi, kerja sama antara Pemprov Kalimantan Timur, RAS Al Khaimah (RAK) Investment Authority paralel dengan RAK Minerals and Metal Investment dan Kabupaten Kutai Timur senilai US\$1,5 miliar. Proyek lainnya adalah kerja sama PT Pertamina dengan ERA Star Dubai dan Itochu Corp untuk pembangunan kilang di Balikpapan senilai US\$1,7 miliar. Kerja sama dengan perusahaan kelas dunia itu merupakan salah satu upaya dan komitmen perseroan untuk membenahi dan meningkatkan kinerja kilang di dalam negeri. Kerja sama dan kemitraan dengan semua negara, termasuk dengan negara-negara muslim, bisa menjadi solusi terbaik di tengah perlambatan ekonomi dunia. Sementara itu, pembiayaan 8 pesawat B737-800NG melalui skema sales and leaseback itu akan membantu ekspansi perusahaan di tengah perkembangan bisnis di kawasan yang masih baik.⁸⁰

Masalah krisis pangan menjadi perhatian negara-negara di Timur Tengah mengingat secara geografis, negara-negara di kawasan tersebut

⁸⁰ Surabaya Post Selasa 3 Maret 2009

sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Wajar jika mereka harus mencari daerah pensuplai pangan (khususnya beras). Sebagai negara agraris, Indonesia merupakan primadona utama dalam bidang agroindustri (khususnya beras). Peran utusan khusus presiden (*president's envoy*), selain bertugas mengundang para investor, juga mempunyai tanggung jawab untuk mengkoordinasikan dengan kementerian terkait dan kepala pemerintahan daerah. Sejumlah daerah yang potensial sudah diminta kerjasamanya untuk aktif menyediakan lahan, terutama daerah di luar Jawa seperti Papua, Maluku, dan Sulawesi. Pemerintah menargetkan, hingga akhir tahun ini sudah ada komitmen investasi dari pihak investor Timur Tengah sekitar USD7-9 miliar. Komitmen ini dalam artian, telah terjalin kesepakatan dan telah dibuka kantor operasional di Indonesia dalam rangka kegiatan investasi tersebut.

Selain mengundang investor, pemerintah juga terus mendorong semua perusahaan baik BUMN maupun swasta untuk aktif memanfaatkan peluang ini. Tidak terbatas bekerja sama di dalam negeri tetapi juga melaksanakan proyek-proyek di Timur Tengah. Beberapa perusahaan Indonesia telah berhasil melaksanakan proyeknya dengan baik seperti Waskita Karya, Adhikarya, Duta Graha di bidang konstruksi. Sementara Medco Oil and Gas, Bakrie Energy (gas), di bidang energi. Sementara untuk bidang rekayasa industri dilakukan EPC. Meski begitu, masih ada beberapa kelemahan di Indonesia diantaranya, sistem birokrasi yang lambat. Hal ini terbukti dari terlambatnya proses investasi. Pemerintah pun terus berusaha

agar masalah ini bisa teratasi untuk mengundang investasi dari negeri-negeri kaya minyak.⁸¹

Alwi Shihab, utusan Khusus Presiden untuk Kawasan Timur Tengah melihat adanya tiga kendala bagi investor di kawasan Timur Tengah yang ingin menanamkan modal di Indonesia. Tiga kendala investasi di Indonesia adalah ekonomi biaya tinggi, isu perpajakan yang kurang menguntungkan investor, dan persoalan sumber daya manusia. Kalangan pebisnis di Timur Tengah yang masih mengeluhkan beberapa hal di antaranya mengenai insentif investasi yang dinilai masih rendah dan ketiadaan biro-biro keuangan Islam di Indonesia. Untuk itu, Indonesia harus mampu menghadapi tantangan tersebut. Pemerintah Indonesia harus menghindari `negative nasionalism` yang melahirkan kebijakan yang kaku sehingga menghambat arus investasi yang akan masuk ke Indonesia. Indonesia mencatat pertumbuhan tertinggi dalam dua tahun terakhir dan hal tersebut merupakan potensi besar bagi investor global.⁸²

⁸¹ http://alwishihab.com/index.php?option=com_content&task=view&id=115, diakses 18 November 2009

⁸² <http://news.antara.co.id/view/?i=1188900881&c=EKB&s=>, diakses 18 November 2009